

Bendungan Langkemme di Kabupaten Soppeng (1970-2008).

Anriani Nurul Maghfira, Patahuddin, Najamuddin

Pendidikan Sejarah FIS UNM

rinhieriani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan latar belakang pembangunan Bendung Langkemme (1970-1995), perkembangan Bendung Langkemme(1995-2008) dan dampak keberadaan Bendung Langkemme di Kabupaten Soppeng (1995-2008). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode historis. Melalui tahapan-tahapan heuristik (pengumpulan data), kritik (verifikasi), Interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan Sejarah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Bendung Langkemme di Kabupaten Soppeng dilatarbelakangi oleh perekonomian nasional, adanya perencanaan pengembangan di daerah Sulawesi Selatan, perekonomian daerah, pengembangan daerah, dan adanya kebutuhan irigasi di Kabupaten Soppeng. Perkembangan Bendung Langkemme dan dampak keberadaan Bendung Langkemme terhadap masyarakat di Kabupaten Soppeng dapat dilihat dari bertambahnya luas persawahan beririgasi, peningkatan hasil produksi pertanian yang berarti meningkatnya penghasilan masyarakat. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Bendung Langkemme di Kabupaten Soppeng terjadi peningkatan hasil pertanian di 5 (lima) kecamatan yang menggunakan air dari Irigasi Langkemme yaitu Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra dan Lilirilau, sesuai dengan program pemerintah pada masa Orde Baru yaitu Pembangunan Lima Tahun (PELITA).

Kata kunci : Bendung, Pertanian, Kabupaten Soppeng.

Abstract

This study to explain the background the construction of Dam Langkemme (1970-1995), the development of Dam Langkemme (1995-2008) and the impact of the existence of Langkemme Dam in Soppeng District (1995-2008). This research is descriptive analysis using historical methods. Through heuristic stages (data collection), criticism (verification), Interpretation (interpretation) and historiography (History writing). The results of this study indicate that the construction of Langkemme Dam in Soppeng District is motivated by the national economy, the development planning in the area of South Sulawesi, regional economy, regional development, and the need for irrigation in Soppeng District. The development of Langkemme Dam and the impact of Langkemme Dam on the community in Soppeng Regency can be seen from the increase in the extent of irrigated rice fields, an increase in agricultural production which means increased income for the community. In the end it can be concluded that with the Langkemme Dam in Soppeng Regency there was an increase in agricultural yields in 5 (five) sub-districts that used water from Langkemme Irrigation in Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra and Lilirilau, in accordance with government programs during Five Development Year (PELITA).

Keywords: Weir, Agriculture, Soppeng Regency.

A. Pendahuluan

Kereta Keberadaan infrastruktur mutlak diperlukan oleh setiap negara. Infrastruktur juga dijadikan salah satu indikator dalam menentukan indeks persaingan global suatu negara. Pemerintah menyadari pentingnya penyediaan infrastruktur karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan mendorong berkembangnya sektor ekonomi lain seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, pertambangan, industri, dan lain-lain. Melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. (PUSDATA, 2012)

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan di tuangkan dalam rencana pembangunan lima tahun atau pelita. Pembangunan dalam pelita merupakan kelanjutan serta peningkatan pelaksanaan pembangunan dalam pelita-repelita sebelumnya dan dilaksanakan atas dasar pemikiran-pemikiran pokok sebagaimana yang dikemukakan dalam UUD 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pembangunan daerah merupakan upaya pencapaian sasaran nasional di daerah sesuai masalah, potensi, aspirasi dan prioritas masyarakat daerah. Sasaran nasional di daerah dan sasaran daerah harus diusahakan dengan sebaik-baiknya. (Republik Indonesia, 1989)

Pada tahun 1970-an pemerintah Indonesia meluncurkan suatu program pembangunan pertanian yang dikenal secara luas dengan Revolusi Hijau yang di masyarakat petani dikenal dengan program BIMAS. Tujuan utama dari program tersebut adalah untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian, khususnya sub-sektor pertanian pangan, melalui penerapan paket teknologi modern. (Loekman Soetrisno, 1998)

Tahun 1980 studi mengenai kemungkinan pembangunan irigasi Langkeme sebagai salah satu proyek dalam rangka pengembangan daerah Sulawesi

Selatan bagian tengah telah dilakukan. (Republik Indonesia, 1979)

Proyek Irigasi Langkeme di Kabupaten Soppeng dilakukan dengan bantuan konsultan dari Nippon Koei Co., Ltd selama delapan bulan dari Juli 1980 sampai Maret 1981. Kemudian dilakukan studi lanjutan di bulan April 1982 oleh konsultan yang sama. Bulan Oktober 1983 sampai Maret 1985 dilakukan kembali studi kelayakan oleh Nippon Koe Co., Ltd dengan P.T Buana Archicon konsultan teknik dari Jakarta Selatan. (Japang Internasional Cooperation Agenc Tekizaitekis LLC, 2015)

Diresmikan 29 September 1993 oleh Presiden Soeharto yang dipusatkan di Parepare beserta proyek pembangunan lainnya seperti Pengoperasian Sistem Stasiun Bumi Satelit Penginderaan Jauh LAPAN, Pabrik Eternit, Kawat Berduri dan Kawat Beton, Pabrik Minuman Ringan, Pabrik Pengolahan Biji Mete dan Hotel Morante.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan metodologi sejarah. Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan spinsip sistematis untuk menggumpulkan sumber-sumber sejarah. Secara sistematis dan menilainya secara kritis serta mengajukan sintesis secara tertulis. (Saleh Majid, 2008). Perlu kiranya memperhatikan unsur budaya dalam memilih metodologi yang akan dipilih dalam hal ini metode sangat penting adanya untuk mengoprasionalisa sikan temuan-temuan di lapangan. (Najering, 2018; Najering and Ridha, 2018; Rifal, 2017; Rifal and Sunarti, 2018) Metode penelitian sejarah meliputi heuristic, kritik, interpretasi dan historiografi

1. Heuristik

Kata heuristik berasal dari kata "*heruriken*" dalam bahasa Yunani yang berarti mencari atau menemukan. Dalam bahasa latin, heuristik dinamakan sebagai *ars inveniendi* (seni mencari) atau sama artinya dengan istilah *arts of invention* dalam bahasa

Inggris. Heuristik artinya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang terkait dengan topik penelitian. Dapat juga diartikan sebagai kegiatan berupa penghimpunan jejak-jejak masa lampau, yakni peninggalan sejarah atau sumber apa saja yang dapat dijadikan informasi dalam pengertian studi sejarah. Usaha untuk merekonstruksi masa lampau tidak mungkin dilakukan tanpa tersedianya sumber-sumber atau bukti-bukti sejarah. Tanpa sumber tidaklah dapat dilacak sejarahnya. Kalaupun mungkin, kebenarannya pasti tidak kokoh. (A. Daliman, 2011)

Ada banyak metode pengumpulan data namun pada umumnya dikenal dengan sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan sumber primer yang dilakukan peneliti yakni wawancara dengan pihak pengelola bendung dan juga petani yang merasakan dampaknya. Pengumpulan sumber menggunakan laporan yang berhubungan dengan Bendung Langkemme serta data-data yang terkait adapun beberapa laporan yang penulis dapatkan berupa *Ex-Post Situation Study* yang berisi ringkasan Studi Proyek Irigasi Langkemme dan beberapa nama pedagang kontruksi yang ikut andil dalam pembangunan. Laporan lainnya berupa *Feasibility Study On The Langkemme Irrigation Project* atau Study Kelayakan pada proyek Irigasi Langkemme yang berisi rincian studi dan rancangan irigasi. Penulis juga mendapat sumber berupa brosur dari Badan Pelaksanaan Proyek Irigasi Bila Bagian Proyek Irigasi Langkemme.

Pengumpulan sumber sekunder menggunakan tulisan-tulisan atau literatur-literatur sebelumnya baik dalam bentuk buku seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun, Inti Pengetahuan Repelita, Standar Perencanaan Irigasi, Profil Investasi Daerah Kabupaten Soppeng dan lainnya, serta menggunakan skripsi yang berhubungan dengan masalah yang ditulis.

2. Kritik

Setelah memperoleh sumber-sumber yang cukup memadai, selanjutnya dilakukan kritik (penyaringan) terhadap sumber tersebut. Kritik terhadap sumber bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta yang seobyektif mungkin, sehingga karya sejarah yang dihasilkan merupakan produk dari proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hasil dari suatu fantasi maupun manipulasi. Ketika melakukan kritik sumber, dua hal penting yang harus dilakukan, yakni kritik otentisitas (kritik ekstern) dan kritik kredibilitas (kritik intern). (Helius Sjamsuddin, 2012)

Kritik ekstern adalah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak.

Kritik ekstern dalam penelitian ini berupa pemeriksaan atas laporan laporan yang didapatkan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) apakah laporan tersebut benar atau telah diubah. Kritik eksternal harus menegakkan fakta dari kesaksian bahwa kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang lain atau pada waktu ini dan kesaksian yang telah diberikan itu telah bertahan tanpa ada perubahan, tanpa ada suatu tambahan-tambahan atau penghilangan-penghilangan substansial.

Kritik intern menekankan aspek “dalam” yaitu isi dari sumber: kesaksian. Setelah fakta dari kesaksian ditegakkan melalui kritik eksternal, tiba gilirannya sejarawan untuk mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu. Ia harus memutuskan apakah kesaksian itu dapat diandalkan atau tidak. (Helius Sjamsuddin, 2012)

3. Interpretasi

Interpretasi adalah proses pemaknaan fakta sejarah. Dalam interpretasi, terdapat dua poin penting, yaitu sintesis (menyatukan) dan analisis (menguraikan). Fakta-fakta sejarah

dapat diuraikan dan disatukan sehingga mempunyai makna yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasikan atau ditafsirkan agar sesuatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik, yakni dengan jalan menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta dalam urutan kausal. Dengan hal ini penulis merekonstruksi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pembangunan bendung seperti program pemerintah orde baru yang dikenal dengan BIMAS. Dengan demikian, tidak hanya pertanyaan dimana, siapa, bilamana, dan apa yang perlu dijawab, tetapi juga berkenaan dengan kata mengapa dan apa jadinya.

Perlu pula dikemukakan disini, bahwa dalam tahapan interpretasi inilah subjektivitas sejarawan bermula dan turut mewarnai tulisannya dan hal itu dapat dihindarkan. Walau demikian, seorang sejarawan harus berusaha sedapat mungkin menekan subjektivitasnya dan tahu posisi dirinya sehingga nantinya tidak membias ke dalam tulisannya.

4. Historiografi

Setelah data dikumpulkan kemudian dikritik (seleksi) menjadi data sejarah dan kemudian dimaknai menjadi fakta, langkah terakhir adalah menyusun semuanya menjadi satu tulisan utuh berbetnuk narasi kronologis. Imajinasi sejarawan bermain disini, tetapi tetap terbatas pada fakta-fakta sejarah yang ada. Semuanya ditulis berdasarkan urutan waktu.

Namun dalam buku yang ditulis oleh Sugeng Priyadi, ia membandingkan langkah-langkah metode sejarah yang diperkenalkan Kuntowijoyo dengan Nugroho Notosusanto. Metode penelitian historis terdiri dari (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik ekstrn dan kritik intern), (4) interpretasi (analisis dan sintesis), dan (5) penulisan (Kuntowijoyo, 1995: 89-105). Menurut Notosusanto (1978: 35-43) meliputi (1) herustik (mencari sumber-sumber), (2)

kritik atau analisis (menilai sumber sejarah), (3) intepretasi atau sintesis (menafsirkan keterangan sumber-sumber), dan (4) historiografi (penulisan sejarah). Langkah awal pemilihan topik oleh Kuntowijoyo dianggap sebagai langkah awal. Hal itu wajar saja karena tanpa ada topik atau sasaran studi, maka sejarawan tidak mungkin langsung melakukan pengumpulan sumber. Meskipun dianggap langkah prapenelitian, tetapi perlu dipertimbangkan sebagai langkah awal dalam penelitian sejarah. (Priyadi Sugeng, 2012)

Semua tulisan yang melibatkan penelitian suatu gejala sejarah dengan jangka yang relatif panjang (aspek diakronis) dan yang melibatkan penelitian aspek ekonomi, masyarakat, atau politik (aspek sinkronis) pastilah memakai juga pendekatan ilmu-ilmu sosial. (Saefur Rochmat, 2009) Penelitian ini memfokuskan pada kajian sejarah sosial ekonomi dengan demikian peneilitian ini akan mengkaji kondisi sosial serta ekonomi masyarakat. Kajian penelitian ini tentunya menggunakan ilmu bantu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial dalam penyusunannya.

C. Tinjauan Penelitian

1. Keadaan Geografis

Keadaan geografis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas individu khususnya pada masyarakat Desa, dimana desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Didik Sukriono, 2014) Desa terbentang dalam aspek geografis, maka di artikan sebagai permukaan mulai dari pesisir dan pulau kecil, persawahan dan daratan rendah, hingga daratan tinggi dan pinggir hutan, yang didalamnya manusia berinteraksi dengan buminya. (Darmawan Salman, 2012)

Desa Watu terletak di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dimana Desa Watu merupakan salah satu desa diantara tiga belas (13) desa di Kecamatan Marioriwawo, yakni Gattareng, Mario Riaja, Watu, Marioritengga, Goarie, Barae, Mariorilau, Tettikenrarae, Labessi, Congko, Watu Toa, Gattareng Toa dan Song. Secara administratif desa Watu berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Watu Toa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Marioritengga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Marioriaja
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone.

Desa Watu memiliki luas 1900 ha yang berjarak 10 km dari ibukota kecamatan yaitu kelurahan Tettikenrarae, sedangkan jarak dari ibukota Kabupaten 27 Km. (Statistik Kabupaten Soppeng, 2010) Topografi Desa Watu merupakan tanah datar dengan ketinggian permukaan laut antara 100-700 M dan mempunyai luas wilayah 19 km² dengan 2 dusun, 4 RW dan 19 RT. Sebagian kecil lahan Desa Watu dimanfaatkan penduduk sebagai area pertanian dan perkebunan. Luas lahan yang digunakan untuk pertanian hanya sekitar 421 ha dari 1900 ha total luas lahan Desa Watu. (Statistik Kecamatan Marioriwawo, 2009) Sumber mata air di Desa Watu berasal dari air sumur, PAM (Perusahaan Air Minum) dan air sungai. Untuk irigasi pertanian masyarakat memanfaatkan air sungai langkemme dengan bantuan Bendung Langkemme. Sungai Langkemme berhulu di gunung Lapancu dan bermuara di Sungai Walanae. Secara umum dilihat dari keadaan geografisnya, wilayah Desa Watu merupakan wilayah yang subur dengan sistem irigasi yang cukup baik. Keadaannya cocok untuk usaha pertanian baik padi maupun palawija.

2. Mata Pencapaian

Mata pencapaian di Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, mayoritas mata pencahariannya yaitu petani 565 orang, pekerja kebun 527 orang, jasa-jasa 331 orang, peternakan 144 orang, perdagangan 40 orang, pegawai diantaranya honorer 150 orang dan PNS 57 orang. Karena mayoritas mata pencahariannya sebagai petani maka masyarakat memerlukan air yang banyak untuk kelangsungan pertaniannya dalam hal ini padi. Dengan demikian pemerintah membangun Bendung Langkemme yang berlokasi di Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dengan tujuan agar produktivitas masyarakat dapat meningkat. (Sumber Daya Desa Watu, 2017)

3. Keadaan Demografis

Kata Demografis berasal dari bahasa Yunani yang berarti: 'demos' yaitu rakyat atau penduduk dan 'grafein' adalah menulis. Jadi demografis mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk), dan perkembangannya (perubahannya). (Ida bagoes Mantra. 2012) Penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menetap dalam suatu wilayah disebut Negara. Penduduk merupakan salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi proses pembangunan di suatu wilayah atau daerah. Karena penduduklah yang melakukan pembangunan sendiri untuk kepentingan manusia itu sendiri yang selanjutnya menikmati hasil-hasilnya. (Nurwana. 2015) Tahun 2004 jumlah penduduk Desa Watu 2.988 jiwa dan mengalami penurunan di tahun 2005 menjadi 2.947 jiwa. Tahun 2006 sampai tahun 2007 bertambah 134 jiwa, tahun 2008 bertambah 194 jiwa. Dalam lima tahun jumlah penduduk Desa Watu mengalami peningkatan dimana penurunan atau pertambahan jumlah penduduk dipengaruhi beberapa faktor yaitu kematian, kelahiran dan migrasi.

D. Pembahasan

1. Latar Belakang Pembangunan Bendung Langkemme (1970-1988)

a. Latar Belakang Perekonomian Nasional

Pada masa pemerintahan Orde Baru berlangsung sektor pertanian menjadi perhatian khusus sebagaimana yang menjadi program pemerintah mulai dari PELITA I sampai dengan PELITA VI pengembangan swasembada pangan untuk peningkatan produksi beras dengan tujuan bahwa menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan pada saat itu merupakan fokus pembangunan. Upaya pemerintah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia. Terkait prasarana irigasi, dibutuhkan suatu perencanaan yang baik, agar sistem irigasi yang dibangun merupakan irigasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan, sesuai fungsinya mendukung produktivitas usaha tani. (Moh. Hasan. 2013.)

a. Adanya Perencanaan Pengembangan di Daerah Sulawesi Selatan

Dalam Pembangunan Lima Tahun (PELITA) II yang telah berhasil pada tahun 1978, Sulawesi Selatan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah pengembangan sesuai dengan kondisi ekonomi daerah masing-masing. Antara lain sebagai berikut :

1. Wilayah Pengembangan Selatan.
2. Wilayah Pengembangan Barat.
3. Wilayah Pengembangan Timur.
4. Wilayah Pengembangan Utara.

b. Latar Belakang Perekonomian Daerah

Wilayah pengembangan timur secara administratif dibawah oleh Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo dan Sidrap. Di Kabupaten Soppeng sawah yang membentang sebagian telah dilengkapi oleh sistem irigasi desa tingkat non-teknis yang belum sepenuhnya berfungsi sebagai penyedia air irigasi.

c. Latar Belakang Pengembangan Daerah

Berdasarkan pada potensi/kondisi wilayah maka pengembangan Kabupaten Dati II Soppeng dengan sasaran utama

mempercepat tercapainya struktur ekonomi yang berimbang antara sektor pertanian dengan sektor lainnya.

d. Adanya Kebutuhan Irigasi

Daerah Irigasi Langkemme termasuk salah satu daerah irigasi yang mendapat prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan Master Plan program pengembangan pertanian di Propinsi Sulawesi Selatan, yang telah disiapkan oleh *Japan Internasional Cooperation Agency (JICA)* pada awal Maret 1980.

▪ Tahap Perencanaan Pembangunan Bendung Langkemme (1970-1988)

Untuk melaksanakan pembangunan, negara perlu terlebih dahulu disusun suatu Rencana Pola Pembangunan. Agar rencana pembangunan itu berhasil mencapai sasarannya, maka pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan terencana (Kansil. 1970).

Tahun 1970-an pemerintah telah memperhatikan pengembangan regional di Sulawesi Selatan. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut dalam rencana pembangunan lima tahun ketiga, yang disebut RELITA III, pemerintah meminta bantuan Jepang memperpanjang bantuan teknis untuk Perumusan Rencana Induk (*Master Plan*) pengembangan di wilayah tersebut. Sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia, *Japan Internasional Cooperation Agency (JICA)* mengirim tim survei pendahuluan pada tahun 1973. Kemudian pada tahun 1976 JICA kembali mengirim dua ahli hidrologi sebagai *Colombo Plan Experts* (Ahli Perencanaan Kolombo) untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian yang akan datang. Sejalan dengan pengumpulan data, JICA memulai pemetaan foto udara dan menyiapkan peta topografi pada skala 1 / 25.000 pada bulan September 1978. (Japan Internasional Cooperation Agency. 1981)

▪ Tahap Pembangunan Bendung Langkemme (1988-1995)

Badan Pelaksanaan Proyek Irigasi Langkemme dibentuk melalui SK Dirjen Pengairan No. 91/KPTS/A/1987, tanggal 2 Mei 1987. Kemudian melalui SK No. 67/KPTS/A/1990, tanggal 1 April 1990 mulai dilakukan pembangunan tahap awal terhadap proyek irigasi Langkemme di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pengairan melalui Direktorat Irigasi II, dan sejak tanggal 1 April 1992 di bawah Pembinaan Direktorat Jenderal Pengairan melalui Kakanwil PU Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya sejak tanggal 1 April 1993 di bawah Pembinaan Direktorat Jenderal Pengairan melalui Kepala Dinas Pengairan Propinsi Sulawesi Selatan dan sejak Tahun Anggaran 1994/1995 berubah menjadi Bagian Proyek Irigasi Langkemme secara operasional di bawah Proyek Irigasi Bila yang dibentuk dengan SK Dirjen Pengairan No. 29/KPTS/A/1994 tanggal 19 April 1994 dan Daftar Isian Proyek (DIP) pada Proyek Irigasi Sulawesi Selatan. (Brosur Badan Pelaksanaan Proyek Irigasi Bila Bagian Proyek Irigasi Langkemme Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pengairan. 1995).

Dalam tahapan pelaksanaan proyek pembangunan Irigasi Langkemme dibantu oleh konsultan supervisi Nippon Koei Limited Company dari Jepang, P.T Necon Ciptajasa, P.T. Buana Archicon, P.T. Pembangunan Perumahan dan P.T Brantas Abipraya dari Indonesia sebagai partner usahanya.

1. Perkembangan Bendung Langkemme di Kabupaten Soppeng (1995-2008)

▪ Komponen-komponen Bendung Langkemme

Bendung adalah bangunan melintang di sungai yang berfungsi meninggikan muka air sungai agar bisa di sadap. Bendung merupakan salah satu dari bagian bangunan utama. Bangunan utama adalah bangunan air

(*hydraulic structure*) yang terdiri dari bagian-bagian: Bendung (*weir structure*), bangunan pengelak (*diversion structure*), bangunan pengambilan (*intake structure*), bangunan pembilas (*flushing structure*), dan bangunan kantong lumpur (*sediment trapstructure*)(Mawardi. 2010)

Data Bangunan

- Nama Bendung : Langkemme
- Lokasi : Desa Watu, Kab. Soppeng
- Kabupaten : Soppeng
- Status D.I : Pemerintah Pusat
- No. Kode D.I : 730223000
- Tipe Bendung : Silinder
- UPT/Pengamat/Ranting: PSDA-PE Soppeng Selatan
- Luas Areal Potensial: 6.708 Ha
- Jumlah Petak Tersier: 126 Buah
 - Soppeng Selatan: 102 Buah
 - Soppeng Tengah: 24 Buah
- Elev. Mercu/Elev. Air Normal : ± 172 meter
- Elev. Air Banjir : 4 Meter
- Elev. Dexer : 6 Meter
- Elev. Dasar Sungai : 12 Meter
- Panjang Mercu : 40 Meter
- Benteng Penguras Bendung : 4 Meter
- Lebar Atas Mercu : 4 Meter
- Lebar Bawah Mercu: 9 Meter
- Tinggi Mercu : 3 Meter
- Panjang Olakan : 14 Meter
- Panjang Tanggul Kiri: 57 Meter
- Panjang Tanggul Kanan : 54 Meter

(Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang. Data Teknis Bendung Langkemme)

▪ Operasi dan Pemeliharaan Bendung Langkemme

Operasi irigasi adalah kegiatan pengaturan pemanfaatan air pada jaringan

irigasi yang berupa pengaturan pola tanam, waktu tanam serta pengaturan buka pintu-pintu pada bangunan air agar sesuai dengan potensi air yang tersedia sehingga air dapat dialirkan keseluruh areal irigasi secara adil dan merata. Sedangkan pemeliharaan adalah usaha melestarikan saluran dan bangunan-bangunan irigasi agar dapat berfungsi selama mungkin sesuai dengan masa pelayanan yang direncanakan (Kementerian Pekerjaan Umum RI. 2013)

▪ Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi sebagai suatu mekanisme yang memiliki tujuan akhir yang hendak dicapai serta memiliki kemampuan untuk mengaktifkan semangat kerjasama para anggotanya. Pengertian organisasi lebih ditekankan pada upaya mewujudkan dan sekaligus mengkoordinasikan kerjasama antara individu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Muhyadi. 2012)

Keberadaan organisasi pengelola Bendung Langkemme sudah ada pada tahun 1995 yang strukturnya masih kepala ranting. Kehadiran organisasi pengelolaan irigasi langkemme tentunya diharapkan mampu mengelola dan mengoperasikan Bendung Langkemme sekaligus jaringan irigasinya untuk kepentingan petani. Organisasi yang dibuat dari tahun 1995 hingga 2000 bernama Ranting Dinas Bendung Langkemme yang merupakan perpanjangan dari Dinas Pengairan Kabupaten Soppeng. Tahun 2001 yang semula bernama Ranting Dinas berganti nama menjadi kantor unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) pengelolaan sumber daya air (PSDA) Soppeng Selatan.

2. Dampak Keberadaan Bendung Langkemme Bagi Masyarakat (1995-2008)

Produksi pertanian masyarakat sebelum Bendung Langkemme beroperasi tahun 1993 kurang memberikan hasil yang maksimal karena menggunakan alat-alat tradisional, pasokan air yang kurang memadai

dalam pengolahan lahan dan keadaan musim tidak menentu yang mempengaruhi pola penanaman. Setelah Bendung Langkemme beroperasi tahun 1993 lahan pertanian lebih produktif dan berkurangnya lahan tadah hujan yang berpengaruh pada produksi hasil pertanian masyarakat.

▪ Peningkatan Hasil Produksi Pertanian

Bendung Langkemme telah difungsikan pada tahun 1993 walaupun pembangunannya belum sepenuhnya selesai tapi sudah dapat digunakan. Hal tersebut sangat mempengaruhi pola penanaman dimana dulu pola tanam masyarakat -padi-palawija-bero (kosong) dan setelah adanya Irigasi Langkemme pola tanam masyarakat -padi-padi-palawija pola pertanian ini juga mengikuti musim tanam secara umum sesuai kondisi curah hujan yakni *musim rendeng* dan *musim gadu* dan tentunya hasil pertanian semakin meningkat. (Bahtiar.2006)

▪ Bidang Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan suatu aspek yang sangat menentukan akan kemajuan suatu daerah, jika perekonomian suatu daerah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun maka daerah tersebut bisa dikatakan berkembang. Sektor ekonomi tentu saja berhubungan dengan mata pencaharian masyarakat di suatu daerah, diantaranya pertanian, peternakan, perdagangan, industri rumah tangga, dan juga lembaga-lembaga ekonomi seperti kredit, koperasi, lumbung desa, bank dan lain sebagainya. (Inggrit Sintia Dewi. 2016)

Keberadaan Bendung Langkemme membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan perekonomian masyarakat yang menggunakan. Perekonomian masyarakat tentu meningkat karena lahan pertanian lebih produktif. Pola penanaman yang diterapkan sebelum adanya Irigasi Langkemme sebagian besar menggunakan sistem tadah hujan atau menunggu penghujan datang kemudian turun ke sawah. Intensitas hujan setiap tahun tidak

bisa diprediksi, apakah akan menjamin hingga musim tanam tiba. Penghasilan dari pola penanaman dengan bergantung pada air hujan hanya bisa dinikmati tergantung kondisi musim penghujan.

Ketika musim penghujan berlalu dan memasuki musim kemarau maka petani bercocok tanam dengan menanam tanaman palawija yang tidak membutuhkan banyak air, hal ini dilakukan untuk menunggu musim hujan selanjutnya. Namun setelah adanya fasilitas pengairan yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Bendung Langkemme, maka pola penanaman berubah. Penghasilan masyarakat tentunya lebih meningkat lagi karena lahan persawahan tetap produktif disaat kemarau tiba.

E. Kesimpulan

Pembangunan Bendung Langkemme di Kabupaten Soppeng dilatarbelakangi oleh perekonomian nasional, adanya perencanaan pengembangan di daerah Sulawesi Selatan, perekonomian daerah, pengembangan daerah, dan adanya kebutuhan irigasi. Awal perencanaan pembangunan Bendung Langkemme dimulai tahun 1970-1982 dengan melakukan studi kelayakan seperti analisis kondisi topografi, analisis geologi, analisis hidrologi, analisis kependudukan, analisis sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya tahapan pembangunan Bendung Langkemme tahun 1988 sampai 1995 dilakukan pembuatan seperti saluran suplesi, saluran induk, saluran sekunder, saluran irigasi kecil, saluran pembuangan, dan pengadaan kelengkapan operasi pemeliharaan.

Komponen-komponen Bendung Langkemme meliputi tubuh bendung, pintu pengambilan, pintu penguras, kantong lumpur, dan bangunan pelengkap lain. Untuk pengoprasian Bendung Langkemme dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Soppeng Selatan yang pengelolaannya dikelola oleh pemerintah

pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang. Tahun 1995 struktur organisasi yang mengelolah Bendung Langkemme bernama Ranting Dinas kemudian tahun 2001 Ranting Dinas diubah menjadi Kantor UPTD PSDA Soppeng Selatan.

Dampak keberadaan Bendung Langkemme bagi masyarakat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliraja, Ganra dan Lilirilau yaitu bertambahnya luas persawahan beririgasi, meningkatnya hasil produksi pertanian yang berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munir. 2017. *Daftar Sumber Daya Manusia Desa Watu*. Watu: Kantor Desa Watu
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. 2009. *Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2008*. Soppeng : Statistik Kabupaten Soppeng.
- Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang. Data Teknis Bendung Langkemme.
- Brosur Proyek Irigasi Bila Bagian Proyek Irigasi Langkemme Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pengairan. 1995. Jaringan Irigasi Langkemme Propinsi Sulawesi Selatan. Watansoppeng: Surya Agung
- Catatan pribadi Bahtiar mengenai Asal Mula Irigasi Langkemme. 2006. Tidak di publikasikan
- Daliman, A. 2011. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta
- Heliu Sjamsuddin. 2012. *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak.
- Inggrit Sintia Dewi. 2016. Desa Cendana Hitam Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur 1973-2014, *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri.
- Japan Internasional Cooperation Agentc Tekizaitekis LLC. 2015. *Ex-Post*

- Situation Study*. Tokyo Japan : Japan Internasional Cooperation Agenct Tekizaitekis LLC.
- Japan Internasional Cooperation Agenct. 1981 . *Feasibility Study On The Langkemme Irrigation Project Main Text*. Tokyo Japan : Republik Indonesia Ministry Of Public Works Directorate General Of Water Resources Development.
- Kementrian Pekerjaan Umum RI. 2013. *Laporan Utama DISIM II (Buku I)*. Makassar: Direktorat Jedral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Popongan Jeneberang.
- Madjid, Muh. Saleh. dkk. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Makassar: UNM press.
- Mantra Baoes, Ida. 2012. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mawardi, dkk. 2010. *Tugas Besar Irigasi II - Perencanaan Bendung Tetap*. Bandung: Alfabeta.
- Moh. Hasan. 2013. *Standar Perencanaan Irigasi - Kriteria Perencanaan - Bangunan Utama KP-02*. Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi Dan Rawa.
- Muhyadi. 2012. *Dinamika Organisasi Konsep dan Aplikasinya dalam Interaksi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nurwana. 2015. Desa Tammerodo Kecamatan Tammerodo Kabupaten Ponre 1986-2015. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Makassar.
- Najering, R., 2018. Optimisme Ekonomi Nelayan Di Tengah Pergolakan Politik Sulawesi Selatan 1954-1965. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science* 2, 38-50.
- Najering, R., Ridha, M.R., 2018. Orang Bugis dalam Silang Budaya Bahari di Pelabuhan Sunda Kelapa. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science* 2, 25-37.
- Rifal, 2017. Modernisasi dan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kampung Gusung Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1954-1998. Universitas Indonesia, Depok.
- Rifal, P., Sunarti, L., 2018. The impact of modernization on the economy for fishermen in Makassar City. *Cultural Dynamics in a Globalized World*.
- Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2012. *Statistik Pekerjaan Umum*. Jakarta : Kementierian Pekerjaan Umum Sekretariat Jenderal Pusat Pengolahan Data (PUSDATA)
- RI. *Republik Indonesia Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/80 - 1983/84 IV Republik Indonesia*
- RI. *Republik Indonesia Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993/94 III*. Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- Rochmat, Saefur. 2009. *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salman, Darmawan. 2012. *Sosiologi Desa: Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*, Makassar: Inninawa.
- Soetrisno, Loekman. 1998. *Pertanian pada Abad ke 21*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Sugeng, Priyadi. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yoyakarta: Ombak.
- Sukriono, Didik. 2014. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Malang: Transisi.